



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA HUKUM DAN HAM



# LAPORAN KEUANGAN

## SEMESTER II

2

0

2

3

**UAKPA (108266)**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 16 Februari 2024  
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. Hilal  
NIP 196905181992031001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 16 Februari 2024  
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. Hilal  
NIP 196905181992031001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.160.091.601,00 atau mencapai 108 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.078.539.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp177.255.424.626,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp184.031.085.000,00.

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.025.814.744.828,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp158.136.788,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.003.987.446.000,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.016.903.509.944,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.379.631.914,00 dan Rp1.011.523.878.030,00.

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.084.940.281,00

sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp150.542.173.865,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp149.457.233.584,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp1.198.253.082,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp150.655.486.666,00).

## **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp985.775.385.185,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp150.655.486.666,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp308.646.486,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp176.095.333.025,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.011.523.878.030,00.

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2023		%	Th 2022
		Anggaran	Realisasi di Atas (Di Bawah)		Realisasi
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.078.539.000	1.160.091.601	108	1.340.057.627
<b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b>		<b>1.078.539.000</b>	<b>1.160.091.601</b>	<b>108</b>	<b>1.340.057.627</b>
<b>Belanja</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	20.579.931.000	20.211.625.267	98	19.676.250.045
Belanja Barang	B.4	115.183.835.000	108.897.330.314	95	66.687.350.024
Belanja Modal	B.5	48.267.319.000	48.146.469.045	100	9.377.521.604
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>184.031.085.000</b>	<b>177.255.424.626</b>	<b>96</b>	<b>95.741.121.673</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## II. NERACA

### BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Persediaan	C.8	156.036.788	362.049.809
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>156.036.788</b>	<b>362.049.809</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.12	687.998.681.000	687.998.681.000
Peralatan dan Mesin	C.13	83.684.347.148	78.982.986.781
Gedung dan Bangunan	C.14	299.630.868.046	293.838.088.733
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15	12.401.733.397	12.359.677.154
Aset Tetap lainnya	C.16	1.450.949.267	1.351.026.622
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.17	25.404.576.337	-
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.18	(97.838.407.261)	(90.793.680.676)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>1.012.732.747.934</b>	<b>983.736.779.614</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.19	1.476.732.100	1.476.732.100
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	12.391.866.906	-
Aset Lain-Lain	C.21	4.793.024.664	3.724.562.402
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.22	(5.735.663.564)	(3.166.176.622)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>12.925.960.106</b>	<b>2.035.117.880</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.025.814.744.828</b>	<b>986.133.947.303</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	3.837.713.972	306.398.797
Pendapatan Diterima di Muka	C.24	33.180.657	52.163.321
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>3.870.894.629</b>	<b>358.562.118</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>3.870.894.629</b>	<b>358.562.118</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.27	1.021.943.850.199	985.775.385.185
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.021.943.850.199</b>	<b>985.775.385.185</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.025.814.744.828</b>	<b>986.133.947.303</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.084.940.281	730.233.178
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.084.940.281</b>	<b>730.233.178</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	20.211.625.267	19.676.250.045
Beban Persediaan	D.3	1.039.399.230	1.968.374.406
Beban Barang dan Jasa	D.4	68.673.335.285	40.028.128.740
Beban Pemeliharaan	D.5	10.240.957.519	13.953.622.011
Beban Perjalanan Dinas	D.6	29.211.124.120	11.158.114.839
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	10.720.661.518	19.933.724.786
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>140.097.102.939</b>	<b>106.718.214.827</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12	<b>(139.012.162.658)</b>	<b>(105.987.981.649)</b>
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(1.198.809.402)	42.513.566
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		237.306.563	522.599.661
<b>JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(961.502.839)</b>	<b>565.113.227</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR</b>		<b>(139.973.665.497)</b>	<b>(105.422.868.422)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa		-	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(139.973.665.497)</b>	<b>(105.422.868.422)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	985.775.385.185	982.967.752.039
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(139.973.665.497)	(105.422.868.422)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		46.797.486	(476.300.693)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	(1.924.000)
SELISIH REVALUASI ASET	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.7	46.797.486	(474.376.693)
LAIN-LAIN	E.8	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>46.797.486</b>	<b>(476.300.693)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	176.095.333.025	108.706.802.261
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		36.168.465.014	(2.807.633.146)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.12	<b>1.021.943.850.199</b>	<b>985.775.385.185</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang masyarakat, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan masyarakat, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk

senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevant*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

**Tujuan :**

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

## Sasaran :

---

- Seluruh aparaturnya Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
  - Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.
- 

## Kedudukan Tugas dan Fungsi

---

**Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

*Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan-LRA**

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

## (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

*Aset Lainnya*

• **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(7) Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

➤ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

➤ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(8) Ekuitas**

*Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode TA 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Perubahan DIPA  
Tahun Anggaran 2023*

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.078.539.000	1.078.539.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.078.539.000</b>	<b>1.078.539.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	20.367.931.000	20.579.931.000
Belanja Barang	70.255.548.000	115.183.835.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	44.290.000.000	48.267.319.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>134.913.479.000</b>	<b>184.031.085.000</b>

### B.1 PENDAPATAN

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp1.160.091.601,  
00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp1.160.091.601,00 atau mencapai 107,56% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.078.539.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
BPSDM Hukum dan HAM TA 2023*

Uraian	TA 2023		
	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	93.577.664	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	91.039.000	158.764.677	174
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000	906.300.000	92
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	892.940	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	556.320	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.078.539.000</b>	<b>1.160.091.601</b>	<b>107,56</b>

Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM antara lain :

- a. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari penjualan peralatan dan mesin, juga atas sewa tanah, gedung dan bangunan.
- b. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi berasal dari Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
- c. Pendapatan Lain-lain yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan*

*TA 2023 dan TA 2022*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi TA 2023</b>	<b>Realisasi TA 2022</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	40.313.566	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	93.577.664	2.200.000	4.153,53
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	158.764.677	178.344.400	(10,98)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	906.300.000	596.600.000	51,91
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	892.940	-	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	556.320	4.162.189	(86,63)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	518.437.472	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.160.091.601</b>	<b>1.340.057.627</b>	<b>(13,43)</b>

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 13,43% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2022. Hal ini disebabkan pada TA 2023 tidak terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan tidak adanya Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp 252.342.341,00 terdiri dari:
  - a. Realisasi pada Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp 93.577.664,00 berupa lelang 1 paket scrab, 4 sepeda motor, 1 paket bekas bongkaran rumah dinas.
  - b. Realisasi pada Akun [425131] Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp158.764.677,00 atas sewa Auditorium, Kamar Flat, Kamar Asrama, Sewa Ruang Kantin.

2. Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan terdiri atas diterimanya PNBP Pelatihan Jabatan Fungsional Penyusunan dan Perancang Perundang-undangan sebesar Rp906.300.000,00
3. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp556.320,00 yang terdiri dari adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dikarenakan pengembalian belanja pegawai atas pengembalian tunjangan umum karena pegawai tersebut menduduki jabatan fungsional a.n. Adnan, dan pengembalian pembulatan gaji pegawai oleh beberapa pegawai karena dampak dari proses pembayaran kekurangan gaji.

## B.2. BELANJA

Realisasi

Belanja

Rp179.794.920.

003,00

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp179.794.920.003,00 atau 97,70% dari anggaran belanja sebesar Rp184.031.085.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023*

Uraian	TA 2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	20.579.931.000	20.213.076.930	98,22
Belanja Barang	115.183.835.000	111.435.374.028	96,75
Belanja Modal	48.267.319.000	48.146.469.045	99,75
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>184.031.085.000</b>	<b>179.794.920.003</b>	<b>97,70</b>
Pengembalian Belanja	-	(2.539.495.377)	-
<b>Total Belanja</b>	<b>184.031.085.000</b>	<b>177.255.424.626</b>	<b>96,32</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 85,71%

Peningkatan realisasi terjadi pada Belanja Barang yang berupa belanja modal pembelian *software* serta belanja peralatan dan mesin. Berikut perbandingan realisasi belanja TA 2023 dengan realisasi belanja TA 2022 :

*Perbandingan Realisasi Belanja  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	Realisasi TA 2023	Relisasi TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	20.213.076.930	19.972.602.908	1,20
Belanja Barang	111.435.374.028	67.462.707.056	65,18
Belanja Modal	48.146.469.045	9.377.521.604	413,42
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>179.794.920.003</b>	<b>96.812.831.568</b>	<b>85,71</b>

### **B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja  
Pegawai*

*Rp20.213.076.  
930,00*

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.213.076.930,00 dan Rp19.972.602.908,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Belanja Pegawai  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	19.538.351.930	19.270.723.908	1,39
Belanja Lembur	674.725.000	701.879.000	4,02
<b>Jumlah</b>	<b>20.213.076.930</b>	<b>19.972.602.908</b>	<b>1,20</b>

Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,20% dibandingkan TA 2022.

## Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

TA 2023

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.300.270.000	13.285.381.740	-	13.285.381.740	99,89
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	233.000	215.217	1.663	213.554	92,37
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	815.486.000	801.947.500	-	801.947.500	98,34
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	218.900.000	213.234.844	-	213.234.844	97,41
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	328.690.000	314.420.000	1.080.000	313.340.000	95,66
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.908.900.000	1.896.386.000	-	1.896.386.000	99,34
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	113.600.000	112.169.149	-	112.169.149	98,74
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	653.725.000	644.103.480	-	644.103.480	98,53
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.957.049.000	1.946.849.000	-	1.946.849.000	99,48
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	336.920.000	323.645.000	370.000	323.275.000	96,06
512211	Belanja Uang Lembur	946.158.000	674.725.000	-	674.725.000	71,31
	<b>Jumlah</b>	<b>20.579.931.000</b>	<b>20.213.076.930</b>	<b>1.451.663</b>	<b>20.211.625.267</b>	<b>98,22</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja pegawai TA 2023 yang disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pegawai yang mutasi menjadi JFT dan promosi menjadi Pejabat Struktural. Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp1.663,00 yang merupakan pengembalian belanja pembulatan gaji PNS a.n Budiono, Dwi Prasetyo, Sugiman. Pengembalian belanja tunjangan struktural PNS sebesar Rp1.080.000,00 dan .pengembalian tunjangan umum PNS sebesar Rp370.000,00.

### B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang*  
Rp111.435.374.  
028,00

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp111.435.374.028,00 dan Rp67.462.707.056,00. Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang satker BPSDM Hukum dan HAM TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 65,18% dari TA 2022. Realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar 96,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 115.183.835.000,00.

Hal ini disebabkan pelaksanaan pelatihan yang lebih banyak diselenggarakan secara klasikal dibandingkan dengan pelatihan yang diselenggarakan secara online sehingga bisa merealisasikan belanja barang keperluan penyelenggaraan diklat tersebut.

Berikut tabel perbandingan realisasi belanja barang BPSDM Hukum dan HAM TA 2023 dan TA 2022.

*Perbandingan Belanja Barang  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	13.807.849.652	12.072.598.693	14,37
Belanja Barang Non Operasional	38.806.856.155	10.524.037.132	268,74
Belanja Persediaan	907.267.609	1.322.855.761	(31,42)
Belanja Jasa	16.043.478.159	17.137.357.821	(6,38)
Belanja Pemeliharaan	10.172.102.689	14.682.649.481	(30,72)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.697.819.764	11.723.208.168	170,39
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>111.435.374.028</b>	<b>67.462.707.056</b>	<b>65,18</b>

*Realisasi Belanja Barang  
TA 2023*

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi TA 2023	%
5211	Belanja Barang Operasional	14.005.783.000	13.807.849.652	-	13.807.849.652	98,59
5212	Belanja Barang Non Operasional	39.399.393.000	38.806.856.155	3.113.500	38.803.742.655	98,50
5218	Belanja Persediaan	915.524.000	907.267.609	-	907.267.609	99,10
5221	Belanja Jasa	16.544.479.000	16.043.478.159	43.208.000	16.000.270.159	96,97
5231	Belanja Pemeliharaan	10.298.081.000	10.172.102.689	5.026.570	10.167.076.119	98,78
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	34.020.575.000	31.697.819.764	2.486.695.644	29.211.124.120	93,17
	<b>Jumlah</b>	<b>115.183.835.000</b>	<b>111.435.374.028</b>	<b>2.538.043.714</b>	<b>108.897.330.314</b>	<b>96,75</b>

1. Pengembalian akun Belanja Barang Non Operasional (5212) terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp 3.113.500,00 atas Belanja Bahan (521211) berupa pengembalian belanja konsumsi rapat dan Belanja Honor Output Kegiatan (521213) berupa pengembalian belanja honor kegiatan.
2. Pengembalian akun Belanja Jasa (5221) terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp43.208.000,00 atas Belanja Jasa Profesi (522151).
3. Pengembalian akun Belanja Pemeliharaan (5231) terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp5.026.570,00 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) berupa pengembalian belanja service AC Split Kelas Politeknik di Tangerang sebesar Rp4.672.770,00 dan pengembalian biaya ongkos kirim pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp353.800,00.
4. Pengembalian akun Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar Rp2.538.043.714,00 pada satker BPSDM Hukum dan HAM atas Belanja Perjalanan Biasa (524111) sebesar Rp2.384.992.435,00, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) sebesar Rp4.050.000.- dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) sebesar Rp 97.653.209,00.

### **B.5 Belanja Modal**

*Belanja Modal  
Rp48.146.469.  
045,00*

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp48.146.469.045,00 dan Rp9.377.521.604,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 38,79% dibandingkan 2022. Berikut tabel perbandingan realisasi belanja modal satker BPSDM Hukum dan HAM TA 2023 dan TA 2022 :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.136.367.645	8.991.142.004	(9,51)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.343.830.587	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5.666.270.813	-	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	386.379.600	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.146.469.045</b>	<b>9.377.521.604</b>	<b>80,52</b>

Kenaikan realisasi belanja modal disebabkan adanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin (53211) sebesar Rp34.343.830.587,00 dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) sebesar Rp5.666.270.813.

*Rincian Realisasi Belanja Modal  
TA 2023*

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi TA 2023	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	0,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.158.484.000	8.136.367.645	-	8.136.367.645	99,73
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.362.999.000	34.343.830.587	-	34.343.830.587	99,94
5361	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5.745.836.000	5.666.270.813	-	5.666.270.813	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.267.319.000</b>	<b>48.146.469.045</b>	<b>-</b>	<b>48.146.469.045</b>	<b>99,75</b>

Realisasi belanja modal tingkat satker BPSDM Hukum dan HAM mencapai 99,75% yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) sebesar Rp8.136.367.645,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) sebesar Rp34.343.830.587,00 berupa pembangunan Gedung Rektorat di Politeknik, dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (5361) sebesar Rp5.666.270.813,00.

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal  
Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp8.136.367.645,  
00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp8.136.367.645,00 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar (9,51%).

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.136.367.645	8.991.142.004	(9,51)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8.136.367.645</b>	<b>8.991.142.004</b>	<b>(9,51)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.136.367.645</b>	<b>8.991.142.004</b>	<b>(9,51)</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp40.010.101,  
400,00

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp40.010.101.400,00 dan Rp0,00. Terjadi kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 disebabkan adanya penambahan gedung dan bangunan hingga 31 Desember 2023.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.343.830.587	0	100
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5.666.270.813	0	100
<b>Jumlah</b>	<b>40.010.101.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Terjadi kenaikan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bagunan pada TA 2023 disebabkan penambahan gedung dan bangunan hingga 31 Desember 2023.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi,  
dan Jaringan  
Rp0,00*

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

*Belanja Modal  
Lainnya  
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp386.379.600,00.

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jalan, irigasi, jaringan dan lain-lain.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022*

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi TA 2023</b>	<b>Realisasi TA 2022</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	0
Belanja <i>Software</i>	-	386.379.600	100
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	0
Belanja Modal BLU	-	-	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>386.379.600</b>	<b>100</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>386.379.600</b>	<b>100</b>

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0,00*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0,00*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp0,00*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB  
Rp0,00*

### **C.4 Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang PNB 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih–Piutang  
Lancar  
Rp0,00*

### **C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar  
TA 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Dibayar di Muka  
Rp0,00*

**C.6 Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka  
TA 2023 dan TA 2022*

Jenis	TA 2023	TA 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
Rp0,00*

**C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 32 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
TA 2023 dan TA 2022*

Jenis	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan  
Rp156.036.788,00

### C.8 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp156.036.788,00 dan Rp362.049.809,00. Rincian Persediaan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan  
TA 2023 dan TA 2022*

JENIS	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Barang Konsumsi	150.875.288	286.185.949
Barang untuk Pemeliharaan	5.161.500	75.863.860
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>156.036.788</b>	<b>362.049.809</b>

Tagihan TP/TGR  
Rp0,00

### C.9 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0,00

### C.10 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Non  
Lancar  
Rp0,00*

### **C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Non Lancar 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah  
Rp687.998.681.  
000,00*

### **C.12 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp687.998.681.000,00 dan Rp687.998.681.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m<sup>2</sup> yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m<sup>2</sup> yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ikhsan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Aset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m<sup>2</sup> yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.
  - Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m<sup>2</sup> akibat pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00 (masih dalam proses penggantian).

Peralatan dan  
Mesin  
Rp85.345.663.456,  
00

### C.13 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp85.345.663.456,00 dan Rp78.982.986.781,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp 80.342.004.389</b>
Mutasi tambah:	Rp 9.685.328.675
Pembelian	Rp 8.110.998.045
Reklasifikasi Masuk	Rp 752.405.944
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 408.187.686
Koreksi Susulan	Rp 136.994.000
Perolehan Lainnya	Rp 276.743.000
Mutasi kurang:	Rp (4.681.669.608)
Koreksi Pencatatan	Rp (136.994.000)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp (3.792.269.664)
Reklasifikasi Keluar	Rp (752.405.944)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 85.345.663.456</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (55.388.907.796)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 29.956.755.660</b>

Mutasi Tambah mencakup pembelian mesin-mesin, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp9.685.328.675,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian
  1. Terdapat pembelian Alat Bantu untuk mendukung operasional kantor senilai Rp912.645.850,00 dengan rincian berupa 1 unit Air Compressor senilai Rp1.037.850,00 ; 1 unit Stationary Generating Set senilai Rp908.500.000,00 ; 2 unit Tandu Lipat senilai Rp3.108.000,00.
  2. Terdapat pembelian Alat Angkutan Darat Bermotor untuk mendukung operasional kantor senilai Rp1.090.000.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM dengan rincian 2 unit pick up senilai Rp440.000.000,00 dan 1 unit mobil ambulance dengan senilai Rp650.000.000,00.
  3. Terdapat pembelian Alat Angkutan Darat Tak Bermotor berupa 2 unit Kursi Roda senilai Rp8.891.100,00.

4. Terdapat pembelian Alat Kantor untuk mendukung operasional kantor senilai Rp746.032.595,00 berupa 10 unit Lemari Besi/Metal; 6 Unit Rak Kayu; 10 Unit Filling Cabinet Besi; 21 unit Tabung Pemadam Api; 2 unit CCTV- Camera Control Television System; 1 unit Papan Visual/Papan Nama; 10 unit Alat Penghancur Kertas; 3 unit Mesin Absensi; 1 unit penangkal petir; 10 unit LCD Projector/Infocus; dan 5 unit Alat Perekam Suara (Voice Pen).
5. Terdapat pembelian Alat Rumah Tangga untuk mendukung operasional kantor senilai Rp3.083.821.000,00 dengan rincian berupa 76 unit Meja Kerja Kayu; 287 unit Kursi Besi/Metal; 5 unit Sice; 4 unit Meja Rapat; 1 Unit Meja Resepsionis; 89 unit Kasur/Spring Bed; 40 unit Meja Makan Besi; 6 unit Sofa; 1 unit Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner; 2 unit Mesin Pemotong Rumput; 3 unit Lemari Es; 43 unit A.C. Split; 15 unit Kipas Angin; 3 unit Exhaust Fan; 2 unit A.c. Cassete; 1 unit Blender; 10 unit Televisi; 6 unit Sound System; 1 Unit Mic Conference; 4 unit Tangga Aluminium; dan 2 unit Tangga Hidrolik dan 10 unit Lampu.
6. Terdapat Pembelian Alat Studio senilai Rp619.763.695,00 berupa 15 buah Head Set, 15 unit Camera Digital, 1 Buah LCD Monitor, 2 unit Video Wall.
7. Terdapat pembelian senilai Rp49.996.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 2 unit Telephone Mobile.
8. Terdapat pembelian sebesar Rp98.937.950,00 berupa Alat Kedokteran untuk mendukung operasional medis berupa 2 unit Stetoscope (Alat Kedokteran Umum); 2 unit Tensimete; 2 unit Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum); 1 unit Brancard; 2 Unit Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum); 22 unit Alat Kedokteran Umum Lainnya; 1 unit Alat Kedokteran Gigi Lainnya.
9. Terdapat pembelian Komputer untuk mendukung operasional kantor senilai Rp1.178.137.000,00 dengan rincian berupa 40 unit P.C Unit; 15 Lap Top; dan 3 Unit Tablet PC.
10. Terdapat pembelian Peralatan Komputer untuk mendukung operasional kantor senilai Rp275.379.400,00 dengan rincian berupa 16 unit Printer (Peralatan Personal Komputer); 10 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer); 23 unit External/Portable Hardisk; dan 10 unit Peralatan Personal Komputer Lainnya.

11. Terdapat Pembelian senilai Rp27.472.500,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 2 buah Net Tennis.
- Reklasifikasi Masuk
    1. Terdapat reklasifikasi masuk Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 6 unit senilai Rp173.624.544,00.
    2. Terdapat Reklasifikasi Masuk pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 unit CCTV- Camera Control Television System senilai Rp199.292.000,00 dan 2 unit Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) senilai Rp29.920.000,00.
    3. Terdapat Reklasifikasi Masuk senilai Rp240.877.400,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 6 unit Mesin Pel/Poles dan 6 unit Portable Air Conditioner (Alat Pendingin).
    4. Terdapat reklasifikasi masuk berupa 1 unit Camera Digital senilai Rp38.100.000,00.
    5. Terdapat Reklasifikasi Masuk senilai Rp70.592.000,- dengan rincian berupa 7 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dan 4 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer).
  - Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
    1. Terdapat Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap yang merupakan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp276.975.000,00 dengan rincian berupa 1 unit Mesin Fotocopy Lainnya; 4 unit Lemari Besi/Metal; 1 Unit Alat Penghancur Kertas; 18 Unit Overhead Projector; dan 9 unit Perkakas Kantor Lainnya.
    2. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp34.845.000,00 berupa 4 unit Amplifier, 2 unit wireless; 2 unit Megaphone; 17 unit Microphone; 15 unit Microphone Table Stand; 12 unit Dispenser; dan 2 unit Handy Cam yang merupakan penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan penggunaan aktif.
    3. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap atas penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp96.367.686,00 berupa 12 unit P.C. Unit.
  - Koreksi Susulan
    1. Terdapat Koreksi Susulan pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 dummy Perkakas Kantor Lainnya senilai Rp136.994.000,00.

- Perolehan Lainnya
  1. Terdapat Perolehan Lainnya Aset senilai Rp700.000,00 berupa 2 Perkakas Kantor Lainnya.
  2. Terdapat perolehan lainnya senilai Rp90.147.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 112 unit Kursi Besi/Metal, 1 buah Jam Elektronik, 1 buah Microphone, 1 buah Blender, 1 buah Thermos Air, dan 1 buah Loudspeaker.
  3. Terdapat Terdapat Perolehan Lainnya Alat Studio senilai Rp3.788.000,00 berupa 2 buah Tripod Camera, 1 buah Alat Tulis Gambar, 1 buah Head Set.
  4. Terdapat Perolehan Lainnya senilai Rp4.156.000,00 berupa 1 Buah Bantal Angin/Wiind Ring, berupa 4 buah Tensimeter dan 4 buah Alat Kedokteran Umum Lainnya.
  5. Terdapat Perolehan Lainnya senilai Rp150.960.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 3 buah Peralatan Permainan Lainnya.

Mutasi Kurang sebesar (Rp4.681.669.608) merupakan penghapusan beberapa barang antara lain:

- Reklasifikasi Keluar
  1. Terdapat reklasifikasi keluar Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 6 unit minibus senilai Rp173.624.544,00.
  2. Terdapat Reklasifikasi Keluar Alat Rumah Tangga senilai Rp167.607.400,00 berupa 6 unit A.C. Split.
  3. Terdapat Reklasifikasi Keluar Unit Alat Laboratorium berupa 2 unit Portal Press senilai Rp29.920.000,00.
  4. Terdapat Reklasifikasi Keluar berupa 4 unit Serial Scanner/Printer senilai Rp35.592.000,00.
  5. Terdapat Reklasifikasi Keluar berupa 1 unit Kamera Digital senilai Rp38.100.000,00.
  6. Terdapat reklasifikasi keluar Peralatan Komputer berupa 7 unit Serial Printer senilai Rp35.000.000,00.
  7. Terdapat Reklasifikasi Keluar 1 unit Closed Circuit Television (CCTV) senilai Rp199.292.000,00.
  8. Terdapat Reklasifikasi Keluar berupa 6 unit Polishing Machine/Mesin Poles senilai Rp73.270.000,00.

- Koreksi Pencacatan berupa 1 unit Heat Generating Equipment Lainnya senilai Rp136.994.000,00.
- Penghentian Aset Dari Penggunaan
  1. Terdapat Penghentian Aset Dari Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 1 unit Sedan senilai Rp187.560.000,00 , 3 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp175.509.000,00, 1 unit Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya senilai Rp22.780.000,00 dan 3 unit Sepeda Motor senilai Rp45.804.000,00.
  2. Terdapat Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp1.241.115.591,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 Mesin Fotocopy Lainnya, 8 unit Lemari Besi/Metal, 10 unit Filling Cabinet Besi, 1 unit Alat Penghancur Kertas, 18 unit Overhead Projector, 1 unit Laser Pointer, 49 unit LCD Projector/Infocus, 1 unit Focusing Screen/ Layar LCD Projector, dan 10 unit Perkakas Kantor Lainnya.
  3. Terdapat Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp1.169.722.321,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 17 unit Meja Kerja Besi/Metal; 552 unit Meja Kerja Kayu; 202 unit Kursi Besi/Metal; 48 unit Kursi Kayu; 55 unit Kasur/Spring Bed; 34 unit Nakas; 5 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner; 2 unit Mesin Pel/Poles; 6 Unit Mesin Pemotong Rumput; 31 Unit A.C. Split; 5 unit Kipas Angin; 4 unit Mixer; 5 unit Televisi; 4 unit Amplifier; 5 unit Loudspeaker; 8 unit Wireless; 2 unit Megaphone; 17 unit Microphone; 15 unit Microphone Table Stand; 12 unit Dispenser; 3 unit Handy Cam.
  4. Terdapat Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp1.770.000,00 berupa 1 unit Tensimeter.
  5. Terdapat Penghentian Aset Dari Penggunaan Komputer operasional kantor senilai Rp834.146.806,00 dengan rincian berupa 75 unit P.C Unit; dan 13 Unit Lap Top.
  6. Terdapat Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan Komputer senilai Rp113.861.946,00 dengan rincian berupa 36 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dan 3 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer).

Gedung dan  
Bangunan  
Rp299.630.868.  
046,00

#### C.14 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah Rp299.630.868.046,00 dan Rp293.838.088.733,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>293.838.088.733</b>
Mutasi tambah:	15.665.248.800
Pembelian	98.679.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	119.436.000
Reklasifikasi Masuk	9.773.790.487
Pengembangan Melalui KDP	5.547.834.813
Koreksi Pencatatan Nilai/Kualitas Mottel Permanen	125.508.500
Mutasi kurang:	9.872.469.487
Reklasifikasi Keluar	9.773.790.487
Koreksi Pencatatan Nilai/Kualitas	98.679.000
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>299.630.868.046</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(45.658.394.629)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>253.972.473.417</b>

Mutasi tambah sebesar Rp15.665.248.800,00 terdiri dari :

- Terdapat Pembelian atas adanya renovasi bangunan olah raga terbuka permanen senilai Rp98.679.000,00 berupa konstruksi dalam pengerjaan.
- Reklasifikasi Masuk reklasifikasi masuk senilai Rp9.773.790.487,00 berupa bangunan gedung pendidikan permanen atas alih fungsi gedung rektorat yang terletak di Tangerang.
- Terdapat Penyelesaian Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai Rp119.436.000,00 dengan berupa Jasa Konsultansi Keandalan dan Jasa Boring Gedung Rektorat Tangerang.
- Pengembangan Melalui KDP senilai Rp5.547.834.813,00 berupa terselesaikannya KDP atas renovasi bangunan olah raga terbuka permanen.

Mutasi kurang sebesar Rp9.872.469.487,00 yang terdiri dari :

- Terdapat reklasifikasi keluar senilai Rp9.773.790.487,00 atas Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa Gedung Rektorat yang terletak di Tangerang dikarenakan adanya alih fungsi bangunan menjadi Bangunan Gedung Pendidikan Permanen.
- Terdapat koreksi pencatatan senilai Rp98.679.000,00 atas renovasi Bangunan Olah Raga Permanen berupa berupa konstruksi dalam pengerjaan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp 12,401,733,397,00

### C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp12.401.733.397,00 dan Rp12.359.677.154,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>12.359.677.154</b>
Mutasi tambah:	-
Pengembangan	42.056.243
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>12.401.733.397</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(7.035.908.055)
<b>Nilai Buku 31 Desember 2023</b>	<b>5.365.825.342</b>

Mutasi Tambah berasal dari perolehan lainnya atas penambahan pada jembatan lainnya senilai Rp42.056.243,00 berupa jembatan penyebrangan.

Aset Tetap Lainnya  
Rp1.450.949.267,00

### C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah Rp1.450.949.267,00 dan Rp1.351.026.622,00

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>1.351.026.622</b>
Mutasi tambah:	199.845.290
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	99.922.645
Penyelesaian Pembangunan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.450.949.267</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(18.480.000)
<b>Nilai Buku 31 Desember 2023</b>	<b>1.432.469.267</b>

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, pada 01 Januari 2023 sebesar Rp1.351.026.622,00 yang terdiri dari :

1. Monografi sebesar Rp717.668.957,00 sebanyak 4.777 buah karya tulis.
2. Referensi sebesar Rp108.869.635,00 berupa Buku Referensi Widyaiswara.

3. Buku Lainnya sebesar Rp452.788.030,00 berupa koleksi buku yang dimiliki perpustakaan BPSDM Hukum dan HAM.
4. Naskah/Manuskrip Berbahan Kertas sebesar Rp48.220.000,00 berupa leaflet, banner, kalender.
5. Alat Musik Modern/Band sebesar Rp18.480.000,00 berupa instrument organ/keyboard sebanyak 1 buah.
6. Pahatan Logam sebesar Rp5.000.000,00 sebanyak 1 buah.

Penjelasan Mutasi Tambah :

1. Pembelian atas aset tetap lainnya yang dikarenakan salah penggunaan akun belanja senilai Rp99.922.645,00 berupa tanaman lainnya yang seharusnya berupa monografi.
2. Reklasifikasi Masuk atas aset tetap lainnya yang dikarenakan adanya pembelian monografi tetapi terjadi kesalahan penggunaan akun belanja senilai Rp99.922.645,00 yang awalnya tercatat sebagai tanaman lainnya kemudian dilakukan reklasifikasi masuk berupa monografi.

Penjelasan Mutasi kurang:

Terdapat reklasifikasi keluar atas aset tetap lainnya yang dikarenakan adanya pembelian monografi tetapi terjadi kesalahan penggunaan akun belanja senilai Rp99.922.645,00 sehingga hanya dapat di catat sebagai tanaman lainnya yang kemudian dilakukan reklasifikasi keluar untuk dicatat sebagai monografi

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp26.913.313.  
622,00*

**C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.913.313.622,00 dan Rp0,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca, terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM berupa pembangunan Gedung Rektorat kampus politeknik di Tangerang yang pembangunannya melewati periode 2023 karena masih diberikan masa penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 19 Februrari 2024.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp97.838.407.  
261,00

### C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember TA 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing Rp97.838.407.261,00 dan Rp90.793.680.676,00.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	83.684.347.148	49.719.922.676	33.964.424.472
2	Gedung dan Bangunan	299.630.868.046	41.512.364.538	258.118.503.508
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.234.754.760	6.587.640.047	4.647.114.713
4	Aset Tetap Lainnya	450.949.267	18.480.000	432.469.267
<b>Total</b>		<b>395.000.919.221</b>	<b>97.838.407.261</b>	<b>297.162.511.960</b>

Aset Tak  
Berwujud  
Rp1.476.732.100,  
00

### C.19 Aset Tak Berwujud (Software)

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.476.732.100,00 dan Rp1.476.732.100,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud 30 Desember TA 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 1.476.732.100
2	ATB Lainnya	Rp -
<b>Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>		<b>Rp 1.476.732.100</b>

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.476.732.100</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.476.732.100</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	Rp	(774.605.950)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>702.126.150</b>

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa *software* sebesar Rp1.476.732.100,00 yang dicatat sebagai aset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

Aset Tak Berwujud pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.476.732.100,00 berupa :

1. CBHRIS BPSDM, Mengelola data kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM Rp31.000.000,00
2. Aplikasi CBT BPSDM, Pelaksanaan ujian Diklat berbasis IT Rp2.000.000,00
3. Video Conference, Pelaksanaan Wawancara Online Rp48.875.000,00
4. Aplikasi Barcode, Membuat barcode BMN untuk DIR Rp88.350.000,00
5. Internet Controller, Monitoring Jaringan internet di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Rp83.900.000,00.
6. Aplikasi SIEVA, Evaluasi Diklat berbasis IT Rp88.800.000,00
7. BPSDM BOX, Penyimpanan data online (Online Storage) Rp90.090.000,00
8. E-learning Metode pembelajaran Rp87.780.000,00
9. E-regis, Aplikasi registrasi pelaksanaan diklat secara elektronik Rp90.502.000,00
10. Jadwal, Monitor jadwal Widyaiswara pada Pelaksanaan Belajar Mengajar Rp93.857.000,00
11. E-sertifikat, Aplikasi Sertifikat Digital Rp88.660.000,00
12. Digital Library, Berisi e-book yang dapat diakses pegawai dan peserta diklat Rp82.445.000,00
13. Webinar kemenkumham, Aplikasi Pendukung proses pembelajaran e-learning Rp50.593.500,00
14. Aplikasi Uji Kompetensi BPSDM Hukum dan Ham, Untuk melakukan kegiatan Uji Kompetensi Rp96.500.000,00

15. Buku Elektronik, Berisi e-book yang dapat diakses pegawai dan peserta diklat Rp67.000.000,00
16. Modul Rumah Belajar Kemenkumham, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kemenkumham Rp288.300.000,00
17. E-Report sebesar Rp98.079.600,00.

*Dana Yang  
Dibatasi  
Penggunaannya  
Sebesar  
Rp12.391.866.  
906,00*

## **C.20 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari dana yang ditentukan untuk membiayai belanja modal yang merupakan hak pemerintah dalam hal ini berasal dari RPATA sebesar Rp12.391.866.906,00 terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM. Dana yang dibatasi penggunaannya dari RPATA Pekerjaan yang selesai per 31 Desember 2023 terdiri dari :

1. Pengadaan Langganan Akses Internet Politeknik Tangerang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan INDONESIA COMNETS PLUS sebesar Rp747.665.400,00.
2. Pengadaan Langganan Akses Internet BPSDM pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan INDONESIA COMNETS PLUS sebesar Rp1.075.026.000,00;
3. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Indoor dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan DANUREKSA SARANA CIPTA sebesar Rp 97.648.550,00;
4. Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Perencana (Pengawasan Berkala) Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM - Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dengan BAGUS DARAJAT KONSULTAN sebesar Rp245.176.702,00;
5. Paket Pekerjaan Konstruksi Konsolidasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor untuk Kegiatan Layanan Prasarana Internal pada BPSDM Hukum dan HAM TA 2023 dengan VIASTA SENTRAL PRIMA sebesar Rp1.288.096.004,00.

Dana yang dibatasi penggunaannya berasal dari RPATA yang penyelesaian pekerjaan pembangunannya melewati periode pelaporan 2023 dengan BAST 77,14% pada 31 Desember 2023 terdiri dari :

1. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan FREYA KARYA UTAMA sebesar Rp430.740.750,00;
2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM-Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dengan GELORA MEGAH SEJAHTERA sebesar Rp8.507.513.500,00;

*Aset Lain-Lain*  
Rp 4.793.024.  
664,00

### C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah Rp 4.793.024.664,00 dan Rp3.724.562.402,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses usulan penghapusan ke Sekretariat Jenderal dari BMN.

#### *Perbandingan Aset Lain-lain TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	TA 2023	TA 2022
Aset Lain-lain	4.793.024.664	3.724.562.402
<b>Jumlah</b>	<b>4.793.024.664</b>	<b>3.724.562.402</b>

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>3.724.562.402</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	3.792.269.664
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.792.269.664
<b>Mutasi kurang:</b>	2.723.807.402
Penghapusan BMN	635.703.216
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	408.187.686
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.679.916.500
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.793.024.664</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(4.793.024.664)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Mutasi tambah sebesar Rp3.792.269.664,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya  
Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp. 3.792.269.664,- berupa Peralatan dan Mesin.

<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1.267</b>	<b>(3,792,269,664)</b>
Sedan	Unit	1	(187,560,000)
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	3	(175,509,000)
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	dummy	1	(22,780,000)
Sepeda Motor	Unit	3	(45,804,000)
Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	1	(21,852,000)
Lemari Besi/Metal	Buah	8	(18,584,000)
Filing Cabinet Besi	Buah	10	(41,630,000)
Alat Penghancur Kertas	Buah	1	(464,000)
Overhead Projector	Buah	18	(12,708,000)
Laser Pointer	Buah	1	(868,995)
LCD Projector/Infocus	Buah	49	(689,088,596)
Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	(2,442,000)
Perkakas Kantor Lainnya	dummy	10	(453,478,000)
Meja Kerja Besi/Metal	Buah	17	(26,520,000)
Meja Kerja Kayu	Buah	552	(304,229,750)
Kursi Besi/Metal	Buah	202	(76,760,000)
Kursi Kayu	Buah	48	(69,300,000)
Kasur/Spring Bed	Buah	55	(66,852,500)
Nakas	Buah	34	(27,115,000)
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	5	(16,000,000)

Mesin Pel/Poles	Buah	2	(17,899,000)
Mesin Pemetong Rumput	Buah	6	(17,100,000)
A.C. Split	Buah	31	(266,161,071)
Kipas Angin	Buah	5	(23,750,000)
Mixer	Buah	4	(26,928,000)
Televisi	Buah	5	(127,050,000)
Amplifier	Buah	4	(2,724,000)
Loudspeaker	Buah	5	(26,862,000)
Wireless	Buah	8	(34,812,000)
Megaphone	Buah	2	(1,008,000)
Microphone	Buah	17	(838,000)
Microphone Table Stand	Buah	15	(3,457,000)
Dispenser	Buah	12	(10,218,000)
Handy Cam	Buah	3	(24,138,000)
Tensimeter	Buah	1	(1,770,000)
P.C Unit	Buah	75	(598,096,806)
Lap Top	Buah	13	(236,050,000)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	36	(62,861,946)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	(51,000,000)

Mutasi kurang sebesar Rp 2.723.807.402,00 terdiri dari :

1. Penghapusan

Terdapat penghapusan Peralatan dan Mesin senilai Rp 103.838.000,00 dan penghapusan Gedung dan Bangunan senilai Rp. 531.865.216,00.

<b>Peralatan dan Mesin</b>			<b>(103,838,000)</b>
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	3	(90,288,000)
Perkakas Kantor Lainnya	dummy	69	(13,550,000)
<b>Gedung dan Bangunan</b>			<b>(531,865,216)</b>
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Buah	1	(235,920,006)
Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Buah	1	(295,945,210)

2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif  
Terdapat Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp408.187.686,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>99</b>	<b>408,187,686</b>
Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	1	21,852,000
Lemari Besi/Metal	Buah	4	5,188,000
Alat Penghancur Kertas	Buah	1	464,000
Overhead Projector	Buah	18	12,708,000
Perkakas Kantor Lainnya	dummy	9	236,763,000
Amplifier	Buah	4	2,724,000
Wireless	Buah	2	162,000
Megaphone	Buah	2	1,008,000
Microphone	Buah	17	838,000
Microphone Table Stand	Buah	15	3,457,000
Dispenser	Buah	12	10,218,000
Handy Cam	Buah	2	16,438,000
P.C Unit	Buah	12	96,367,686

3. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

Terdapat Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp 1.679.916.500,00 berupa :

<b>Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan</b>		<b>26</b>	<b>(1,679,916,500)</b>
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	2	(157,509,000)
Sepeda Motor	Unit	4	(61,072,000)
Perkakas Kantor Lainnya	dummy	3	(59,793,000)
Camera Electronic	Buah	4	(548,000)
Handy Talky (HT)	Buah	2	(6,282,500)
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	1	0
Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	1	0
Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	2	(444,660,000)
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	5	(622,494,000)
Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	2	(327,558,000)

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp5.735.663.  
564,00

### C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.735.663.564,00 dan Rp3.166.176.622,00 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
TA 2023*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Lain-lain	-	-	-
1	Software Komputer	1.476.732.100	942.638.900	534.093.200
2	ATB Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.476.732.100</b>	<b>942.638.900</b>	<b>534.093.200</b>
B	Aset Lainnya	4.793.024.664	4.793.024.664	-
<b>Jumlah</b>		<b>4.793.024.664</b>	<b>4.793.024.664</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>6.269.756.764</b>	<b>5.735.663.564</b>	<b>534.093.200</b>

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp4.962.349.941,  
00

### C.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp4.962.349.941,00 dan Rp306.398.797,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 4.962.349.941
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 384.101.316
<b>Total</b>		<b>Rp 5.346.451.257</b>

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) sebesar Rp384.101.316,00 merupakan belanja daya jasa listrik, telepon, dan air pemakaian Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024.

Adapun rincian dari utang kepada pihak ketiga merupakan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp4.962.349.941,00 terdiri dari :

- BAST RPATA 100% dan sudah dilakukan Jurnal Penyesuaian ke Utang Pihak Ketiga Lainnya, yaitu :
  1. BAST konsultan perencanaan pembangunan gedung rektorat di Tangerang senilai Rp. 245.176.702,00.

2. BAST kontrak langganan akses internet BPSDM senilai Rp. 1.075.026.000,00
  3. BAST kontrak langganan akses internet Poltekip dan Poltekim senilai Rp. 747.665.400,00.
  4. Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Tennis Indoor BPSDM senilai Rp. 1.288.096.004,00.
  5. Konstruksi Lapangan Tennis Indoor BPSDM Senilai Rp. 97.648.550,00.
- BAST RPATA 77,14% dan sudah dilakukan Jurnal Penyesuaian ke Utang Pihak Ketiga Lainnya, yaitu :
    1. Kontrak konstruksi Gedung Rektorat di Tangerang Senilai Rp. 1.275.792.687,00.
    2. Kontrak pengawas konstruksi Gedung Rektorat di Tangerang Senilai Rp. 232.944.598,00.

*Pendapatan*

**C.24 Pendapatan Diterima di Muka**

*Diterima di Muka  
Rp33.180.657,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp33.180.657,00 dan Rp52.163.321,00. Pendapatan Diterima di Muka sampai dengan 31 Desember TA 2023 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp0,00*

**C.25 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka  
Pendek Lainnya  
Rp0,00*

**C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

*Ekuitas*

*Rp985.775.385.  
185,00*

### **C.27 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp985.775.385.185,00 dan Rp982.967.752.039,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBP*  
*Rp1.084.940.281,00*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.084.940.281,00 dan Rp730.233.178,00. Berikut rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak pada 31 Desember TA 2023 dan 2022:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
per TA 2023 dan 2022*

Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Sumber Daya Manusia	-	-	-
Pendapatan bagian Pemerintah Atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.084.940.281	730.233.178	67,31
<b>Jumlah</b>	<b>1.084.940.281</b>	<b>730.233.178</b>	<b>67,31</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri dari:

1. Rp 177.747.341 yang berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.
2. Rp906.300.000,00 yang berasal dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
3. Rp892.940,00 yang berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

### D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
*Rp20,211,625,267,00*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.211.625.267,00 dan Rp19.676.250.045,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian Jenis Beban	2023	2022
Beban Gaji Pokok PNS	13.285.381.740	12.815.475.580
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		-2.243
Beban Pembulatan Gaji PNS	213.554	188.178
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	801.947.500	818.476.988
Beban Tunjangan Anak PNS	213.234.844	210.237.932
Beban Tunjangan Struktural PNS	313.340.000	645.195.000
Pengembalian Beban Tunjangan Struktural PNS		- 287.100.120
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.896.386.000	1.790.849.000
Beban Tunjangan PPh PNS	112.169.149	123.158.170
Beban Tunjangan Beras PNS	644.103.480	629.547.060
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS		-
Beban Uang Makan PNS	1.946.849.000	1.930.481.000
Pengembalian Beban Uang Makan PNS		
Beban Tunjangan Umum PNS	323.275.000	307.115.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		-9.250.500
Beban Uang Lembur	674.725.000	701.879.000
<b>Jumlah</b>	<b>20.211.625.267</b>	<b>19.676.250.045</b>

**D.3 Beban Persediaan**

*Beban  
Persediaan  
Rp1.113.280.630,  
00*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.113.280.630,00 dan Rp2.618.680.566,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.039.399.230	1.968.374.406	(47,20)
Beban Persediaan Bahan untuk Peme	73.881.400	650.306.160	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.113.280.630</b>	<b>2.618.680.566</b>	<b>(57,49)</b>

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

##### *Beban Barang dan Jasa*

*Rp68.740.450.285,00*

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp68.740.450.285,00 dan Rp40.028.128.740,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan belanja jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

##### *Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	12.692.160.784	9.694.337.606	(23,62)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.448.910	714.000	(50,72)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	434.100.000	304.950.000	(29,75)
Beban Barang Operasional Lainnya	680.139.958	1.035.824.698	52,30
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.036.772.389	(100,00)
Beban Bahan	7.714.650.667	4.322.069.084	(43,98)
Beban Honor Output Kegiatan	483.560.000	899.597.000	86,04
Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.269.872.443	4.237.643.630	(86,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	-	1.039.115.818	(100,00)
Beban Langganan Listrik	4.451.021.416	3.240.449.362	(27,20)
Beban Langganan Telepon	13.258.962	14.533.860	9,62
Beban Langganan Air	167.640.500	894.500	(99,47)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.634.092.481	3.598.401.829	0,99
Beban Jasa Konsultan	-	69.870.000	-
Beban Sewa	1.975.319.300	2.122.384.468	7,45
Beban Jasa Profesi	5.529.700.000	6.701.857.338	21,20
Beban Jasa Lainnya	272.120.500	179.533.000	(34,02)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	325.000	1.331.180.158	(99,98)
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	99.922.645	-	
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	236.479.400	198.000.000	(16,27)
<b>Jumlah</b>	<b>68.655.812.966</b>	<b>40.028.128.740</b>	<b>(41,70)</b>

## D.5 Beban Pemeliharaan

Beban  
Pemeliharaan  
Rp10.240.957.519,  
00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing se besar Rp10.240.957.519,00 dan Rp13.953.622.011,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

### *Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.812.914.520	11.341.012.430	(31)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	386.866.882	-	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.967.294.717	1.962.303.421	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	73.881.400	650.306.160	100
<b>Jumlah</b>	<b>10.240.957.519</b>	<b>13.953.622.011</b>	<b>(27)</b>

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan Dinas  
Rp29.211.124.120,  
00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.211.124.120,00 dan Rp11.158.114.839,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

### *Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022*

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	22.107.338.701	6.053.418.304	265,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.930.000	732.514.000	-79,40
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	71.792.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.952.855.419	4.300.390.535	61,68
<b>Jumlah</b>	<b>29.211.124.120</b>	<b>11.158.114.839</b>	<b>161,79</b>

### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan  
Sosial  
Rp0,00

Beban Bantuan Sosial 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

#### *Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial*

#### *TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp21.149.815.553,  
00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.149.815.553,00 dan Rp19.933.724.785,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.537.609.800	10.385.887.613	11
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.198.029.089	7.965.186.836	3
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.007.540.992	1.147.669.952	(12)
Beban Penyusutan Irigasi	19.808.858	19.808.858	-
Beban Penyusutan Jaringan	10.156.250	10.156.250	-
Beban Amortisasi Software	336.065.900	323.805.950	4
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	40.604.664	81.209.327	(50)
<b>Jumlah</b>	<b>21.149.815.553</b>	<b>19.933.724.786</b>	<b>6</b>

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

*Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Rp0,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**D.11 Beban Lain-Lain**

*Beban Lain-lain Rp0,00*

Jumlah Beban Lain-lain untuk pada 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp1.198.253.082,  
00

#### D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah Rp1.198.253.082,00 dan Rp524.799.661,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional  
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	93.577.664	2.200.000	4153,53
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	556.320	4.162.189	(87)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	518.437.472	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(1.292.387.066)	-	(100)
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(1.198.253.082)</b>	<b>524.799.661</b>	<b>(328)</b>

\*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

- Realisasi pada Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp 93.577.664,00 berupa lelang 1 paket scrab, 4 sepeda motor, 1 paket bekas bongkaran rumah dinas.
- Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp556.320,00 dikarenakan pengembalian belanja pegawai atas pengembalian tunjangan umum dan tunjangan pembulatan karena ada pegawai yang menduduki jabatan fungsional.
- Realisasi Akun [596111] Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.292.387.066,00 merupakan beban yang timbul dari Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan.

### **D.13 POS-POS LUAR BIASA**

*Pos-Pos Luar Biasa* Rp0,00

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp0,00.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp985.775.385.185,00</i>	<b>E.1 Ekuitas Awal</b> Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp985.775.385.185,00 dan Rp982.967.752.039,00.
<i>Surplus/Defisit LO</i> <i>(Rp150.664.628.532,00)</i>	<b>E.2 Surplus/Defisit LO</b> Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah defisit sebesar (Rp 150.664.628.532,00) dan (Rp 105.422.868.422,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp0,00</i>	<b>E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</b> Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023 sebesar Rp0,00.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0,00</i>	<b>E.4 Penyesuaian Nilai Aset</b> Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp0,00)</i>	<b>E.5 Koreksi Reklasifikasi Aset</b> Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp1.924.000,00).
<i>Selisih Revaluasi Aset</i> <i>Rp0,00</i>	<b>E.6 Selisih Revaluasi Aset</b> Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp0,00.

### E.7 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp 308.606.486,00*

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp 308.606.486,00 dan (Rp474.376.693,00). Koreksi Nilai Aset Non revaluasi pada 30 September 2023 pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp 308.606.486,00.

#### *Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi*

Deskripsi	Nominal
Jurnal untuk mengoreksi kesalahan penggunaan kode aset atas koreksi aset yang membentuk perolehan lainnya	Rp261.809.000,00
Koreksi Nilai KDP Berkurang Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	(Rp3.000.000,00)
Koreksi Nilai KDP Bertambah Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Rp101.679.000,00
Koreksi Pencatatan Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	(Rp98.679.000,00)
Koreksi Pencatatan KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	(Rp261.849.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Motel Permanen	Rp92.232.441,00
Koreksi Susulan Perkakas Kantor Lainnya	Rp136.994.000,00
Reklasifikasi Masuk	Rp79.420.045,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp308.606.486,00</b>

### E.8 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain  
Rp0,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### E.9 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp176.095.333.  
025,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp176.095.333.025,00 dan Rp108.706.802.261,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.160.091.601)
Ditagikan ke Entitas Lain	177.255.424.626
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>176.095.333.025</b>

**E.10 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)**

*DDEL/ DKEL*  
*Rp1.160.091.601,*  
*00 /*  
*Rp177.255.424.626*  
*,00*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember TA 2023, DDEL sebesar (Rp1.160.091.601,00) sedangkan DKEL sebesar Rp177.255.424.626,00.

**E.11 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

*Transfer*  
*Masuk/Transfer*  
*Keluar Rp0,00*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember TA 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**E.12 Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*  
*Rp1.011.514.696.*  
*164,00*

Nilai ekuitas pada 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.011.514.696.164,00 dan Rp985.775.385.185,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Terdapat ketidaksesuaian Kode Akun dan Kode BMN pada BPSDM BPSDM senilai Rp304.119.300,00. Ketidaksesuain kode akun dikarenakan tidak terdapat anggaran belanja yang sesuai pada RKAKL untuk menampung realisasi belanja dan tidak dapat dilakukan koreksi SPM atas akun belanja tersebut.

Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp304.119.300,00 terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.376.400,00 atas pembelian Oksimeter Omron.
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.798.200,00 atas pembelian Termometer Infrared Yuwel.
  - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.642.800,00 atas pembelian Kursi Lipat portabel Folding Chair Soleil.
  - d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp2.830.500,00 atas pembelian Alat cek kadar gula darah, kolesterol, hemoglobin, dan asam urat Easytouch.
  - e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp3.552.000,00 atas pembelian Alat cek kadar gula darah, kolesterol, hemoglobin, dan asam urat Accupro.
  - f. Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp29.250.000,00 atas pembelian *Ear Phone*. Ketidaksesuaian kode akun disebabkan anggaran yang tersedia untuk belanja barang tersebut merupakan jenis belanja ekstrakomptable namun nilai realisasi belanja melebihi nilai kapitalisasi dan tidak dapat dicatat sebagai intrakomptable.
  - g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp.261.849.000,00 atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor.
  - h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.820.400 atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor.
2. Terdapat Transaksi Resiprokal Pendapatan yang diterima BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp36.252.000,00 atas Pendapatan Penerimaan Dari Peserta Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Angkatan III Bpsdm Hukum Dan HAM TA.2023 atas nama Andrian,SH.

Terdapat juga Transaksi Resiprokal Belanja yang dilakukan BPSDM Hukum dan HAM kepada beberapa Satuan Kerja yang terdiri dari :

- a. Transaksi Resiprokal Belanja pada Balai Besar Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Sebesar Rp 1.408.438.000.
  - b. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Di Yogyakarta Sebesar Rp.858.221.000,00.
  - c. Transaksi Resiprokal Belanja pada Lembaga Administrasi Negara Jakarta Sebesar Rp105.200.000,00.
  - d. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Sebesar Rp1.685.906.000,00.
  - e. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Hukum Administrasi Negara Sebesar Rp700.445.000,00.
  - f. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Sebesar Rp1.171.440.000,00.
  - g. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Sebesar Rp374.050,00.
  - h. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusdikmin Lemdiklat POLRI Sebesar Rp1.757.160.000,00.
  - i. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Sebesar Rp2.606.454.000,00.
  - j. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan Sebesar Rp95.060.000,00.
  - k. Transaksi Resiprokal Belanja pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan Profesi Sebesar Rp673.578.000,00.
3. Aset tanah pada BPSDM Hukum dan HAM yang Sertifikatnya belum Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM dan belum diungkap dalam CaLBMN dan sudah dilakukan koordinasi ke BPN Depok untuk dilakukan permohonan pengukuran ulang melalui surat Nomor SDM.1-PB.04.01-02 tanggal 14 Maret 2023.

4. Ganti Rugi atas Pengurangan luasan Tanah sebesar 3.420 m yang telah beralih menjadi Jalan Tol Depok-Antasari (dalam pengelolaan PUPR/ Jasa Marga) dengan nilai ganti rugi sesuai penilaian appraisal Rp25.248.900.000,00 dan telah terbit Surat Sekretaris BPSDM Nomor SDM.1-PB.03.01-14 tanggal 13 Juli 2023 hal tindak lanjut penyediaan pembangunan pengganti milik BPSDM yang terkena pembangunan tol depok antasari yang ditujukan kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, bahwasanya telah dilakukan pembongkaran bangunan eksisting (Rumah Negara) dan kesiapan untuk dilakukan pembangunan pengganti berupa Rumah Dinas Eselon I, Rumah Dinas Flat dan Sarana Prasarana di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**

**SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 21/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:14 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	158,136,788	362,049,809	(203,913,021)	(56.32)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>158,136,788</b>	<b>362,049,809</b>	<b>(203,913,021)</b>	<b>(56.32)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	687,998,681,000	687,998,681,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	83,693,591,148	78,982,986,781	4,710,604,367	5.96
Gedung dan Bangunan	299,630,868,046	293,838,088,733	5,792,779,313	1.97
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,401,733,397	12,359,677,154	42,056,243	0.34
Aset Tetap Lainnya	1,450,949,267	1,351,026,622	99,922,645	7.40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26,913,313,622	0	26,913,313,622	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(108,101,690,480)	(90,793,680,676)	(17,308,009,804)	19.06
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,003,987,446,000</b>	<b>983,736,779,614</b>	<b>20,250,666,386</b>	<b>2.06</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	1,476,732,100	1,476,732,100	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	12,391,866,906	0	12,391,866,906	0.00
Aset Lain-lain	4,793,024,664	3,724,562,402	1,068,462,262	28.69
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(5,903,696,514)	(3,166,176,622)	(2,737,519,892)	86.46
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>12,757,927,156</b>	<b>2,035,117,880</b>	<b>10,722,809,276</b>	<b>526.89</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,016,903,509,944</b>	<b>986,133,947,303</b>	<b>30,769,562,641</b>	<b>3.12</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,346,451,257	306,398,797	5,040,052,460	1,644.93
Pendapatan Diterima Dimuka	33,180,657	52,163,321	(18,982,664)	(36.39)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5,379,631,914</b>	<b>358,562,118</b>	<b>5,021,069,796</b>	<b>1,400.33</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5,379,631,914</b>	<b>358,562,118</b>	<b>5,021,069,796</b>	<b>1,400.33</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	1,011,523,878,030	985,775,385,185	25,748,492,845	2.61
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,011,523,878,030</b>	<b>985,775,385,185</b>	<b>25,748,492,845</b>	<b>2.61</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,011,523,878,030</b>	<b>985,775,385,185</b>	<b>25,748,492,845</b>	<b>2.61</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1,016,903,509,944</b>	<b>986,133,947,303</b>	<b>30,769,562,641</b>	<b>3.12</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**

**SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 21/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:14 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 21 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M.HILAL, SH

196905181992031001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 21/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:16 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	177,255,424,626
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,160,091,601	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	93,577,664
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	158,764,677
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	906,300,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	892,940
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	556,320
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,285,381,740	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	215,217	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	801,947,500	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	213,234,844	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	314,420,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,896,386,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	112,169,149	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	644,103,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,946,849,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	323,645,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	674,725,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,692,160,784	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,448,910	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	434,100,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	680,139,958	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,717,021,667	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	483,560,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,269,872,443	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	236,479,400	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	99,922,645	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	708,181,298	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	199,086,311	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,451,021,416	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	13,258,962	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	167,640,500	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,634,092,481	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,975,319,300	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,529,700,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	272,120,500	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	325,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,812,914,520	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 21/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:16 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	386,866,882	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,972,321,287	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,492,331,136	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	154,980,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,050,508,628	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,136,367,645	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,343,830,587	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,666,270,813	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,663
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,080,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,371,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	742,500
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	43,208,000
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	5,026,570
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,384,992,435
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,050,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	97,653,209
JUMLAH			180,955,011,604	180,955,011,604

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 21 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARANM.HILAL, SH  
196905181992031001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 21/02/24 6:32 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:17 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	152,975,288	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,161,500	0
0.0	131111	Tanah	687,998,681,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	83,693,591,148	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	299,630,868,046	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,390,995,097	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,450,949,267	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	26,913,313,622	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	55,388,907,796
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	45,658,394,629
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	6,021,131,053
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	128,757,577
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	886,019,425
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	18,480,000
0.0	162151	Software	1,476,732,100	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	12,391,866,906	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,793,024,664	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	4,793,024,664
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,110,671,850
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	384,101,316
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,962,349,941
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	33,180,657
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	177,255,424,626
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,160,091,601	0
0.0	391111	Ekuitas	0	985,775,385,185
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	308,646,486
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	93,577,664
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	177,747,341
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	906,300,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	892,940
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	556,320
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	13,285,381,740	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	213,554	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	801,947,500	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	213,234,844	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	313,340,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 21/02/24 6:32 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:17 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,896,386,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	112,169,149	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	644,103,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,946,849,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	323,275,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	674,725,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	12,673,766,784	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,448,910	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	434,100,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	680,139,958	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,714,650,667	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	482,817,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	30,269,872,443	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	293,054,700	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	99,922,645	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,513,107,447	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,315,450	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	183,200,500	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,634,092,481	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,975,319,300	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,486,492,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	272,120,500	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	325,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,812,914,520	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	344,810,639	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,967,294,717	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22,107,338,701	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,930,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,952,855,419	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,539,771,934	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,198,029,089	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,007,540,992	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	19,808,858	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	10,156,250	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	336,065,900	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	40,604,664	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,040,799,230	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	73,881,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 21/02/24 6:32 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:17 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,292,387,066	0
JUMLAH			1,283,903,549,470	1,283,903,549,470

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 21 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M.HILAL, SH

196905181992031001

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013**  
**UNIT ORGANISASI : 12**  
**WILAYAH/PROVINSI : 0100**  
**SATUAN KERJA : 108266**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**  
**DKI JAKARTA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

*Tgl. Cetak 21/02/2024 10:18 AM*  
*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_satker --rekon17*

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	286,185,949	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	75,863,860	0
0.0	131111	Tanah	687,998,681,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	78,982,986,781	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	293,838,088,733	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,351,026,622	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	47,349,709,240
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	37,427,089,481
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	5,013,590,061
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	108,948,719
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	875,863,175
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	18,480,000
0.0	162151	Software	1,476,732,100	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,724,562,402	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,391,570,672
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	774,605,950
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	306,398,797
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	52,163,321
0.0	391111	Ekuitas	0	985,775,385,185
<b>JUMLAH</b>			<b>1,080,093,804,601</b>	<b>1,080,093,804,601</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013  
**ESELON I** : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12  
**SATUAN KERJA** : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 108266

Tgl Data : 21/02/24 6:32 AM  
Tgl Cetak : 21/02/24 10:18 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>184,031,085,000</b>	<b>177,255,424,626</b>	<b>(6,775,660,374)</b>	<b>96</b>	<b>99,766,309,000</b>	<b>95,741,121,673</b>	<b>(4,025,187,327)</b>	<b>96</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 21 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

M.HILAL, SH  
196905181992031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 12  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100  
**SATUAN KERJA** : 108266

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**DKI JAKARTA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 21/02/24 10:20 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	93,577,664	0	93,577,664	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	91,039,000	158,764,677	0	158,764,677	174.39
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	91,039,000	252,342,341	0	252,342,341	277.18
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	906,300,000	0	906,300,000	91.78
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	906,300,000	0	906,300,000	91.78
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	892,940	0	892,940	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	892,940	0	892,940	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	556,320	0	556,320	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	556,320	0	556,320	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,078,539,000	1,160,091,601	0	1,160,091,601	107.56
	JUMLAH PENDAPATAN	1,078,539,000	1,160,091,601	0	1,160,091,601	107.56

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 12  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100  
**SATUAN KERJA** : 108266  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**DKI JAKARTA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 21/02/24 10:21 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
Tgl Data : 21/2/24 8:08 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,369,021,000	13,300,270,000	13,285,381,740	0	13,285,381,740	99.89	14,888,260
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200,000	233,000	215,217	1,663	213,554	92.37	19,446
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	891,886,000	815,486,000	801,947,500	0	801,947,500	98.34	13,538,500
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	204,897,000	218,900,000	213,234,844	0	213,234,844	97.41	5,665,156
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	711,890,000	328,690,000	314,420,000	1,080,000	313,340,000	95.66	15,350,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,139,870,000	1,908,900,000	1,896,386,000	0	1,896,386,000	99.34	12,514,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	69,534,000	113,600,000	112,169,149	0	112,169,149	98.74	1,430,851
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	693,525,000	653,725,000	644,103,480	0	644,103,480	98.53	9,621,520
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,075,649,000	1,957,049,000	1,946,849,000	0	1,946,849,000	99.48	10,200,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	405,320,000	336,920,000	323,645,000	370,000	323,275,000	96.06	13,645,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>19,561,792,000</b>	<b>19,633,773,000</b>	<b>19,538,351,930</b>	<b>1,451,663</b>	<b>19,536,900,267</b>	<b>99.51</b>	<b>96,872,733</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	806,139,000	946,158,000	674,725,000	0	674,725,000	71.31	271,433,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>806,139,000</b>	<b>946,158,000</b>	<b>674,725,000</b>	<b>0</b>	<b>674,725,000</b>	<b>71.31</b>	<b>271,433,000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>20,367,931,000</b>	<b>20,579,931,000</b>	<b>20,213,076,930</b>	<b>1,451,663</b>	<b>20,211,625,267</b>	<b>98.22</b>	<b>368,305,733</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,312,426,000	12,857,643,000	12,692,160,784	0	12,692,160,784	98.71	165,482,216
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000,000	15,150,000	1,448,910	0	1,448,910	9.56	13,701,090
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	343,920,000	435,000,000	434,100,000	0	434,100,000	99.79	900,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	447,950,000	697,990,000	680,139,958	0	680,139,958	97.44	17,850,042
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	620,750,000	0	0	0	0		0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>14,745,046,000</b>	<b>14,005,783,000</b>	<b>13,807,849,652</b>	<b>0</b>	<b>13,807,849,652</b>	<b>98.59</b>	<b>197,933,348</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	8,973,505,000	8,165,234,000	7,717,021,667	2,371,000	7,714,650,667	94.51	450,583,333
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	702,910,000	527,320,000	483,560,000	742,500	482,817,500	91.7	44,502,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,940,000,000	30,367,716,000	30,269,872,443	0	30,269,872,443	99.68	97,843,557
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	764,150,000	0	0	0	0		0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	239,123,000	236,479,400	0	236,479,400	98.89	2,643,600
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	100,000,000	99,922,645	0	99,922,645	99.92	77,355
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>13,380,565,000</b>	<b>39,399,393,000</b>	<b>38,806,856,155</b>	<b>3,113,500</b>	<b>38,803,742,655</b>	<b>98.5</b>	<b>595,650,345</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 12  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100  
**SATUAN KERJA** : 108266  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**DKI JAKARTA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 21/02/24 10:21 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 21/2/24 8:08 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	120,000,000	715,524,000	708,181,298	0	708,181,298	98.97	7,342,702
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	200,000,000	200,000,000	199,086,311	0	199,086,311	99.54	913,689
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>320,000,000</b>	<b>915,524,000</b>	<b>907,267,609</b>	<b>0</b>	<b>907,267,609</b>	<b>99.1</b>	<b>8,256,391</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,100,000,000	4,458,000,000	4,451,021,416	0	4,451,021,416	99.84	6,978,584
522112	Belanja Langganan Telepon	36,000,000	16,800,000	13,258,962	0	13,258,962	78.92	3,541,038
522113	Belanja Langganan Air	75,000,000	172,758,000	167,640,500	0	167,640,500	97.04	5,117,500
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,695,200,000	3,662,681,000	3,634,092,481	0	3,634,092,481	99.22	28,588,519
522141	Belanja Sewa	1,902,874,000	1,979,756,000	1,975,319,300	0	1,975,319,300	99.78	4,436,700
522151	Belanja Jasa Profesi	7,097,300,000	5,981,354,000	5,529,700,000	43,208,000	5,486,492,000	92.45	494,862,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	35,350,000	272,805,000	272,120,500	0	272,120,500	99.75	684,500
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	993,283,000	325,000	325,000	0	325,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>15,935,007,000</b>	<b>16,544,479,000</b>	<b>16,043,478,159</b>	<b>43,208,000</b>	<b>16,000,270,159</b>	<b>96.97</b>	<b>544,208,841</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,422,080,000	7,853,162,000	7,812,914,520	0	7,812,914,520	99.49	40,247,480
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	768,709,000	398,788,000	386,866,882	0	386,866,882	97.01	11,921,118
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,868,330,000	2,046,131,000	1,972,321,287	5,026,570	1,967,294,717	96.39	78,836,283
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>5,059,119,000</b>	<b>10,298,081,000</b>	<b>10,172,102,689</b>	<b>5,026,570</b>	<b>10,167,076,119</b>	<b>98.78</b>	<b>131,004,881</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,669,665,000	26,668,815,000	24,492,331,136	2,384,992,435	22,107,338,701	91.84	4,561,476,299
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,521,930,000	168,952,000	154,980,000	4,050,000	150,930,000	91.73	18,022,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,624,216,000	7,182,808,000	7,050,508,628	97,653,209	6,952,855,419	98.16	229,952,581
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>20,815,811,000</b>	<b>34,020,575,000</b>	<b>31,697,819,764</b>	<b>2,486,695,644</b>	<b>29,211,124,120</b>	<b>93.17</b>	<b>4,809,450,880</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>70,255,548,000</b>	<b>115,183,835,000</b>	<b>111,435,374,028</b>	<b>2,538,043,714</b>	<b>108,897,330,314</b>	<b>96.75</b>	<b>6,286,504,686</b>
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,772,565,000	8,158,484,000	8,136,367,645	0	8,136,367,645	99.73	22,116,355
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>4,772,565,000</b>	<b>8,158,484,000</b>	<b>8,136,367,645</b>	<b>0</b>	<b>8,136,367,645</b>	<b>99.73</b>	<b>22,116,355</b>
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,417,435,000	34,362,999,000	34,343,830,587	0	34,343,830,587	99.94	19,168,413
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,100,000,000	5,745,836,000	5,666,270,813	0	5,666,270,813	98.62	79,565,187
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331</b>	<b>39,517,435,000</b>	<b>40,108,835,000</b>	<b>40,010,101,400</b>	<b>0</b>	<b>40,010,101,400</b>	<b>99.75</b>	<b>98,733,600</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>44,290,000,000</b>	<b>48,267,319,000</b>	<b>48,146,469,045</b>	<b>0</b>	<b>48,146,469,045</b>	<b>99.75</b>	<b>120,849,955</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100 **DKI JAKARTA**  
**SATUAN KERJA** : 108266 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 21/02/24 10:21 AM  
 Halaman : 3  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 21/2/24 8:08 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	134,913,479,000	184,031,085,000	179,794,920,003	2,539,495,377	177,255,424,626	97.7	6,775,660,374

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 12  
**WILAYAH/PROVINSI** : null  
**SATUAN KERJA** : 108266  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**BA(013) ES1(12) DKI JAKARTA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 21/02/24 10:22 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid --rekon17  
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	620,750,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	620,750,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	764,150,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	764,150,000	0	0	0	0		0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	993,283,000	325,000	325,000	0	325,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	993,283,000	325,000	325,000	0	325,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,378,183,000	325,000	325,000	0	325,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	2,378,183,000	325,000	325,000	0	325,000	100	0

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**

**SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 21/02/24 6:32 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:23 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,084,940,281	730,233,178	354,707,103	48.574
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,084,940,281	730,233,178	354,707,103	48.574
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,084,940,281	730,233,178	354,707,103	48.574
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	20,211,625,267	19,676,250,045	535,375,222	2.721
Beban Persediaan	1,040,799,230	1,968,374,406	(927,575,176)	(47.124)
Beban Barang dan Jasa	68,727,746,285	40,028,128,740	28,699,617,545	71.699
Beban Pemeliharaan	10,198,901,276	13,953,622,011	(3,754,720,735)	(26.909)
Beban Perjalanan Dinas	29,211,124,120	11,158,114,839	18,053,009,281	161.793
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**

**SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 21/02/24 6:32 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:23 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	21,151,977,687	19,933,724,786	1,218,252,901	6.112
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>150,542,173,865</b>	<b>106,718,214,827</b>	<b>43,823,959,038</b>	<b>41.065</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(149,457,233,584)</b>	<b>(105,987,981,649)</b>	<b>(43,469,251,935)</b>	<b>41.013</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(1,198,809,402)	42,513,566	(1,241,322,968)	(2,919.828)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	93,577,664	42,513,566	51,064,098	120.112
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,292,387,066	0	1,292,387,066	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	556,320	522,599,661	(522,043,341)	(99.894)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	556,320	522,599,661	(522,043,341)	(99.894)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(1,198,253,082)</b>	<b>565,113,227</b>	<b>(1,763,366,309)</b>	<b>(312.038)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(150,655,486,666)</b>	<b>(105,422,868,422)</b>	<b>(45,232,618,244)</b>	<b>42.906</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(150,655,486,666)</b>	<b>(105,422,868,422)</b>	<b>(45,232,618,244)</b>	<b>42.906</b>

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 21 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M.HILAL, SH  
196905181992031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 108266 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 21/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 21/02/24 10:24 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	985,775,385,185	982,967,752,039	2,807,633,146	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(150,655,486,666)	(105,422,868,422)	(45,232,618,244)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	308,646,486	(476,300,693)	784,947,179	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(1,924,000)	1,924,000	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	308,646,486	(474,376,693)	783,023,179	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	176,095,333,025	108,706,802,261	67,388,530,764	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	25,748,492,845	2,807,633,146	22,940,859,699	-
EKUITAS AKHIR	1,011,523,878,030	985,775,385,185	25,748,492,845	-

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 21 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M.HILAL, SH

196905181992031001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 108266**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl.Data : 21/02/24 6:00 AM  
Tgl.Cetak : 21/02/24 10:26 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	152,975,288
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,161,500
131111	Tanah	687,998,681,000
132111	Peralatan dan Mesin	83,693,591,148
133111	Gedung dan Bangunan	299,630,868,046
134111	Jalan dan Jembatan	10,390,995,097
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,178,766,300
135121	Aset Tetap Lainnya	1,450,949,267
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	26,913,313,622
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(55,388,907,796)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45,658,394,629)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(6,021,131,053)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(128,757,577)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(886,019,425)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(18,480,000)
162151	Software	1,476,732,100
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,793,024,664
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(4,793,024,664)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,110,671,850)
<b>J U M L A H</b>		<b>1,004,511,643,038</b>

Depok, 21 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Subbagian Rumah Tangga

KOMARUDIN  
197911152005011001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 108266**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 22/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/02/24 8:02 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>100,350</b>	<b>687,998,681,000</b>	<b>3,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,770</b>	<b>687,998,681,000</b>
20101	TANAH PERSIL	-	100,350	687,998,681,000	3,420	0	0	0	103,770	687,998,681,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>9,387</b>	<b>78,982,986,781</b>	<b>780</b>	<b>9,392,273,975</b>	<b>1,301</b>	<b>4,681,669,608</b>	<b>8,866</b>	<b>83,693,591,148</b>
30101	ALAT BESAR DARAT	-	7	221,856,000	0	0	0	0	7	221,856,000
30103	ALAT BANTU	-	56	943,476,820	4	912,645,850	0	0	60	1,856,122,670
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	39	5,538,105,544	9	1,263,624,544	14	605,277,544	34	6,196,452,544
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	12	40,373,000	2	8,891,100	0	0	14	49,264,100
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	9	71,000,000	0	0	0	0	9	71,000,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	6	240,309,700	0	0	0	0	6	240,309,700
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	0	0	11	44,562,000	0	0	11	44,562,000
30501	ALAT KANTOR	-	1,204	7,711,797,726	115	1,389,213,595	99	1,241,115,591	1,220	7,859,895,730
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	6,341	34,626,384,137	473	3,198,265,955	1,038	1,337,329,721	5,776	36,487,320,371
30601	ALAT STUDIO	-	159	10,073,757,301	36	660,451,695	0	0	195	10,734,208,996
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	133	947,610,750	2	49,996,000	0	0	135	997,606,750
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	12	210,668,800	0	0	0	0	12	210,668,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	54	574,095,000	15	89,494,050	1	1,770,000	68	661,819,050
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	12,306,000	0	0	0	0	1	12,306,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	11	224,539,500	0	0	2	29,920,000	9	194,619,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	4	35,592,000	0	0	4	35,592,000	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	38,100,000	0	0	1	38,100,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	891	13,914,508,347	70	1,274,504,686	88	834,146,806	873	14,354,866,227
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	419	2,452,812,756	37	319,842,000	46	148,861,946	410	2,623,792,810
31301	SUMUR	-	8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	199,292,000	0	0	1	199,292,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	7	210,264,000	0	0	7	210,264,000	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	2	46,750,000	0	0	0	0	2	46,750,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	3	53,868,000	6	180,782,500	0	0	9	234,650,500
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>52</b>	<b>293,838,088,733</b>	<b>2</b>	<b>15,665,248,800</b>	<b>2</b>	<b>9,872,469,487</b>	<b>52</b>	<b>299,630,868,046</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	32	222,550,353,674	2	15,539,740,300	2	9,872,469,487	32	228,217,624,487
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	17	65,775,520,161	0	125,508,500	0	0	17	65,901,028,661
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	3	5,512,214,898	0	0	0	0	3	5,512,214,898
<b>134111</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>		<b>15,687</b>	<b>10,348,938,854</b>	<b>6</b>	<b>42,056,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,693</b>	<b>10,390,995,097</b>
50101	JALAN	-	15,687	10,348,938,854	0	0	0	0	15,687	10,348,938,854
50102	JEMBATAN	-	0	0	6	42,056,243	0	0	6	42,056,243

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 108266**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 22/02/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 22/02/24 8:02 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>134112</b>	<b>Irigasi</b>		<b>1</b>	<b>831,972,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>831,972,000</b>
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	-	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
<b>134113</b>	<b>Jaringan</b>		<b>5</b>	<b>1,178,766,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,178,766,300</b>
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	-	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>5,576</b>	<b>1,351,026,622</b>	<b>554</b>	<b>99,922,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,130</b>	<b>1,450,949,267</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	5,573	1,279,326,622	554	99,922,645	0	0	6,127	1,379,249,267
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	1	18,480,000	0	0	0	0	1	18,480,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>141</b>	<b>3,724,562,402</b>	<b>1,267</b>	<b>3,792,269,664</b>	<b>136</b>	<b>2,723,807,402</b>	<b>1,272</b>	<b>4,793,024,664</b>
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	263,956,000	8	431,653,000	7	308,869,000	8	386,740,000
30501	ALAT KANTOR	-	50	1,306,458,000	99	1,241,115,591	46	350,318,000	103	2,197,255,591
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	55	124,373,000	1,032	1,169,722,321	54	34,845,000	1,033	1,259,250,321
30601	ALAT STUDIO	-	4	548,000	0	0	4	548,000	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	6,282,500	0	0	2	6,282,500	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	0	0	1	1,770,000	0	0	1	1,770,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	12	96,367,686	88	834,146,806	12	96,367,686	88	834,146,806
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	39	113,861,946	0	0	39	113,861,946
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	531,865,216	0	0	2	531,865,216	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	9	1,394,712,000	0	0	9	1,394,712,000	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>1,078,255,022,692</b>		<b>28,991,771,327</b>		<b>17,277,946,497</b>		<b>1,089,968,847,522</b>

Depok, 30 Nopember 2022  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Subbagian Rumah Tangga

KOMARUDIN  
197911152005011001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 108266**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM  
Tgl Cetak : 22/02/24 8:03 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>3,505</b>	<b>1,359,017,608</b>	<b>384</b>	<b>293,054,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,889</b>	<b>1,652,072,308</b>
30501	ALAT KANTOR	-	763	140,403,600	2	700,000	0	0	765	141,103,600
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	2,555	1,133,063,130	321	251,425,400	0	0	2,876	1,384,488,530
30601	ALAT STUDIO	-	39	31,024,998	2	1,200,000	0	0	41	32,224,998
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	30	11,962,500	0	0	0	0	30	11,962,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	4	470,000	26	13,599,900	0	0	30	14,069,900
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	34	26,173,380	33	26,129,400	0	0	67	52,302,780
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	80	15,920,000	0	0	0	0	80	15,920,000
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>99,922,645</b>	<b>554</b>	<b>99,922,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60501	TANAMAN	-	0	0	554	99,922,645	554	99,922,645	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>1,359,017,608</b>		<b>392,977,345</b>		<b>99,922,645</b>		<b>1,652,072,308</b>

Depok, 30 Nopember 2022  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Subbagian Rumah Tangga

KOMARUDIN  
197911152005011001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 108266**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 22/02/24 6:00 AM  
Tanggal : 22/02/24 8:04 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_atb\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>162151</b>	<b>Software</b>		<b>17</b>	<b>1,476,732,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1,476,732,100</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	17	1,476,732,100	0	0	0	0	17	1,476,732,100
<b>162191</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>1,476,732,100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1,476,732,100</b>

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

**UAPA** : 013                      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAKPB** : 108266                **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 22/02/24 6:00 AM  
Tanggal : 22/02/24 8:05 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		17	1,476,732,100	(774,605,950)	(336,065,900)	0	(1,110,671,850)	366,060,250
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	17	1,476,732,100	(774,605,950)	(336,065,900)	0	(1,110,671,850)	366,060,250
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			17	1,476,732,100	(774,605,950)	(336,065,900)	0	(1,110,671,850)	366,060,250